

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 8, No. 1, 2026

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**PERAN MEDIA MASSA DALAM KONSTRUKSI CITRA POLITISI
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLITIK DI MEDIA ONLINE
INDONESIA**

Imaida Noor Hasibuan¹, Katimin², Hasrat Efendi Samosir³

imaida4004233015@uinsu.ac.id , katimin@uinsu.ac.id,
hasratefendisamosir@uinsu.ac.id

Abstract

The mass media plays an important role in shaping public perception of politicians through various framing techniques in news reports. This study aims to analyze the way online media in Indonesia frames political news and its impact on the image of politicians. The methodology used in this study is framing analysis based on the Robert N. Entman model, which includes four main elements: problem identification, causal interpretation, moral evaluation, and solution recommendations. The data used in this study was obtained through content analysis of political news published by a number of leading online media in Indonesia. The findings of this study show that online media often show bias in reporting political news, which is influenced by various interests, including the economy, politics, and ideology carried by the media. Framing techniques applied by the media have the potential to shape public opinion, both in strengthening a positive image and creating a negative view of certain politicians. It is important for politicians and political communication teams to understand the dynamics of the media in order to design an effective response strategy in maintaining or building the desired public image. By understanding the way the media frames the news, politicians can better respond to emerging issues and seize opportunities to improve their image in the eyes of the public. This is becoming increasingly relevant in the digital age, where information can spread quickly and affect public perception at large.

Keywords: Society Perception, Framing Technic, Politician Image, Framing Analysis

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

A. PENDAHULUAN

Politik merupakan suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan terkait kepentingan masyarakat luas, yang dilaksanakan melalui sistem pemerintahan yang ada. Di Indonesia, praktik politik dan pemerintahan berlangsung dalam konteks demokrasi, dengan adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, mengatur kebijakan publik, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Tugas pemerintah mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan sumber daya nasional demi mencapai tujuan negara.⁴

Politisi merupakan individu yang berperan aktif dalam arena politik, baik di dalam struktur pemerintahan maupun di luar itu. Pengaruh mereka sangat signifikan dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi yang menentukan arah pembangunan suatu negara. Politisi biasanya menduduki posisi dalam pemerintahan, seperti menteri atau kepala daerah, atau di lembaga legislatif, di mana mereka berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, politisi sering kali menjadi tokoh sentral dalam partai politik, bertanggung jawab atas perumusan strategi partai dan pengelolaan kampanye politik.

Media memainkan peran yang signifikan dalam membentuk opini publik mengenai politik dan pemerintahan. Selain itu, media berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, isu-isu politik yang kontroversial, serta keputusan yang diambil oleh pemerintah. Isu keberpihakan media dan transparansi menjadi sangat krusial, mengingat berita politik sering kali dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap individu atau keputusan politik tertentu. Berita politik memiliki peranan penting dalam

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), XI.

membentuk pandangan masyarakat, di mana pemerintah memanfaatkan informasi dan media sebagai alat dalam proses regulasi.

Selain itu aktor-aktor politik, termasuk media, berkontribusi dalam memperkuat atau merusak pandangan terhadap isu-isu politik tertentu. Dengan kemajuan teknologi dan munculnya media sosial, penyebaran berita politik menjadi lebih cepat dan berpotensi besar dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Artikel ini mengkaji peran berbagai aktor dalam konteks berita politik, yang mencakup pemerintah, politisi, dan media massa, dalam membentuk persepsi publik serta menjaga stabilitas politik di dalam masyarakat.

Berita politik berfungsi sebagai salah satu alat vital dalam pelaksanaan demokrasi, terutama di tengah perkembangan informasi yang sangat pesat saat ini. Melalui berita politik, masyarakat dapat memantau kemajuan isu-isu kebijakan, keputusan, serta tindakan pemerintah, di mana para politisi berperan sebagai tokoh sentral dalam arena politik. Namun, dengan volume informasi yang melimpah, keakuratan dan objektivitas berita politik sering kali menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, media memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat informatif, tepat, dan seimbang. Di sisi lain, pemerintah memegang peranan krusial sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi dinamika politik di suatu negara. Selain itu, para politisi juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan publik melalui berbagai saluran, termasuk pemanfaatan media massa dan platform media sosial.

Di zaman kita, lebih dari sebelumnya, para kandidat berbicara kepada rakyat melalui media massa daripada secara langsung.⁵ Informasi di media massa menjadi satu-satunya kontak yang dimiliki banyak orang dengan politik. Janji, janji, dan retorika yang dirangkum dalam berita, kolom, dan tajuk rencana merupakan sebagian besar informasi yang harus dijadikan dasar pengambilan

⁵ Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw, 'The Agenda-Setting Function of Mass Media 2', *The Agenda Setting Journal*, 1.2 (2017), 105–16 <<https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>>; Paul F Lazarsfeld, Bernard R Berelson, and William N Mcphee, *VOTING* (Chicago: The University of Chicago Press, 1954).

keputusan pemungutan suara. Sebagian besar dari apa yang diketahui orang datang kepada mereka dari tangan kedua atau tangan ketiga dari media massa atau dari orang lain.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran media online di Indonesia dalam membentuk persepsi publik terhadap politisi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di negara ini. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang signifikan bagi para akademisi, praktisi media, politisi, dan masyarakat luas dalam memahami perubahan dinamika politik yang terjadi di era digital. Dengan fokus pada interaksi antara media online dan citra politisi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana informasi yang disebarkan melalui platform digital mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap para pemimpin politik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini juga akan menganalisis implikasi dari citra yang dibentuk oleh media online terhadap partisipasi politik dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang peran media dalam proses politik kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing untuk menyelidiki bagaimana media daring di Indonesia

⁶ Maxwell E. McComb and Donald L. Shaw, 'American Association for Public Opinion Research The Agenda-Setting Function of Mass Media Author (s): Maxwell E . McCombs and Donald L . Shaw Published by : Oxford University Press on Behalf of the American Association for Public Opinion Research Stabl', *Public Opinion Quaterly*, 36.2 (1972), 176–87; McCombs and Shaw.

membentuk persepsi publik terhadap politisi melalui laporan politik.⁷ Melalui analisis framing, peneliti dapat mengidentifikasi cara media dalam memilih, mengorganisir, dan menyajikan informasi yang berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap para politisi.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana citra politisi dibangun dalam konteks pemberitaan politik di media daring Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana teknik framing yang digunakan dalam laporan media dapat menciptakan persepsi tertentu mengenai tokoh-tokoh politik.⁹ Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara media dan citra politisi, serta bagaimana pemberitaan dapat membentuk opini publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi komunikasi dan politik, serta memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam memahami pengaruh media terhadap persepsi masyarakat.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berita Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Opini Publik

Berita politik memiliki peranan yang krusial dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan dan isu-isu politik yang ada. Melalui informasi yang disampaikan oleh media massa, masyarakat dapat mengetahui tindakan pemerintah serta respons para politisi terhadap isu-isu yang sedang hangat. Informasi ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk membangun opini, memberikan dukungan, atau bahkan menolak kebijakan tertentu atau partai politik. Sebagai contoh, berita politik yang muncul menjelang pemilihan umum

⁷ Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii.

⁸ PATRICIA LEAVY, *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches, Sustainability (Switzerland)* (New York and London: The Guilford Press, 2017), xi.

⁹ Johnny Saldana Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), xi.

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

biasanya memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan mencakup beragam sudut pandang, baik dari kandidat maupun masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, media sosial kini juga berperan penting dalam distribusi berita politik, memungkinkan informasi menyebar dengan cepat di berbagai kalangan masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif.¹¹

Berita politik memainkan peranan yang krusial dalam pembentukan opini masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh media berita dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap isu-isu politik, tokoh pemimpin, serta kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Dalam era digital saat ini, laju informasi semakin cepat dan menyebar secara luas melalui berbagai platform media sosial, yang turut memengaruhi proses pembentukan opini publik. Peran Berita Politik dalam pembentukan opini publik sehingga menghasilkan berita politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh *American Press Institute* menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengandalkan media sebagai sumber informasi politik, terutama ketika media tersebut dikenal memiliki reputasi yang baik dan bersikap netral. Dengan adanya akses yang luas terhadap berita politik, masyarakat dapat membangun opini mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh media.¹²

Tidak semua laporan politik disampaikan dengan cara yang objektif. Media sering kali memiliki kecenderungan atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi perspektif berita yang disampaikan kepada masyarakat. McQuail menyatakan bahwa media yang bersifat partisan dapat menimbulkan bias dalam pemberitaan, yang pada gilirannya dapat memecah opini publik. Ketika berita mengandung elemen subjektif, masyarakat dapat terpengaruh oleh cara

¹¹ McComb and Shaw; W. Lance Bennett, 'The Politics of Illusion', in *The Pan-African Nation* (Chicago and London: University of Chicago Press, 2013), pp. 223–57 <<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226023564.003.0008>>.

¹² Media Insight Project, 'The Personal News Cycle: How Americans Choose to Get News', *American Press Institute*, 2014.

penyampaian informasi tersebut, sehingga terbentuk opini publik yang cenderung condong ke satu pihak.¹³

Media sosial saat ini berfungsi sebagai saluran utama dalam distribusi berita, termasuk berita yang berkaitan dengan politik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa 62% orang dewasa di Amerika Serikat memperoleh informasi berita melalui platform media sosial, yang menandakan bahwa media sosial memainkan peran signifikan dalam penyebaran berita politik. Namun, berita yang beredar di media sosial sering kali tidak terverifikasi dan rentan terhadap penyebaran informasi palsu, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik berdasarkan informasi yang keliru atau menyesatkan.¹⁴

Berita politik yang bersifat sensasional dapat menyebabkan polarisasi di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok dengan pandangan yang berlawanan. Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik di suatu negara. Sebuah laporan dari *Reuters Institute for the Study of Journalism* menunjukkan bahwa berita politik yang provokatif dapat memperburuk ketegangan sosial dan memicu munculnya berbagai gerakan protes yang dipimpin oleh masyarakat yang merasa terpengaruh oleh isu-isu politik tertentu.

Di Indonesia pemberitaan politik yang disampaikan oleh berbagai media, baik nasional maupun lokal, memiliki dampak yang besar terhadap pandangan masyarakat. Contohnya, selama periode pemilihan umum, pandangan publik dapat terbentuk dan mengalami polarisasi yang tinggi seiring dengan kampanye politik yang dilakukan oleh masing-masing pihak melalui media. Dampak ini semakin meningkat ketika media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi tertentu, yang sering kali disertai dengan manipulasi atau informasi yang

¹³ Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, 2010.

¹⁴ Elisa Shearer and Amy (Pew Research Center) Mitchell, 'News Use Across Social Media Platforms in 2020: Facebook Stands Out as a Regular Source of News for About a Third of Americans', *Pew Research Center*, 12 (2021), 1–18.

menyesatkan, dengan tujuan untuk memengaruhi opini publik.¹⁵ Informasi politik memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat. Namun, keberhasilan pengaruh tersebut sangat tergantung pada ketepatan, objektivitas, dan keandalan sumber informasi. Di zaman digital ini, masyarakat dituntut untuk lebih selektif dalam menyerap berita politik dan mampu mengenali sumber yang dapat dipercaya. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengembangkan pandangan yang didasarkan pada informasi yang valid dan mendukung kemajuan sosial.

2. Peran Pemerintah Dalam Mengatur Informasi Politik

Pemerintah memainkan peran krusial dalam mengelola arus informasi politik guna mempertahankan stabilitas sosial, menjamin transparansi, serta melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang keliru atau dapat menimbulkan kerusakan. Tugas ini sering kali sejalan dengan upaya untuk menjaga demokrasi, keadilan, dan hak-hak individu. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan dan mengatur informasi yang berkaitan dengan aspek politik dan kebijakan publik. Dalam beberapa situasi, pemerintah menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang mendukung kebijakan tertentu. Di samping itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disebar tidak menimbulkan disinformasi atau propaganda yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Dalam berbagai keadaan, pemerintah sering kali menerapkan kebijakan tertentu untuk mengendalikan media agar tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Salah satu contoh regulasi pemerintah yang berupaya mengatur penyebaran informasi di media digital, termasuk berita politik, adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Nic Newman and others, 'Reuters Institute Digital News Report 2022', 53.9 (2022), 1689–99.

¹⁶ Peter Gross, *Entangled Evolutions. Media and Democratization in Eastern Europe*. Baltimore, MD and Washington, D.C.: The Johns Hopkins University Press/ Woodrow Wilson Center Press, 2002. ISBN 0-801868505. 226 Pgs., 2002

Pemerintah sering kali menerapkan pembatasan atau pengendalian terhadap informasi demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Tindakan ini diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan politik yang dapat muncul akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau bersifat provokatif, terutama dalam konteks politik yang sensitif. Salah satu contohnya adalah pembatasan akses terhadap informasi tertentu selama periode kampanye politik atau situasi darurat, dengan tujuan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memecah belah persatuan.¹⁷

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak atas kebebasan berekspresi terlindungi, tanpa mengorbankan akurasi informasi yang disampaikan. Pengaturan ini mencakup upaya untuk menyeimbangkan hak berbicara dengan tanggung jawab terhadap konten yang dipublikasikan. Dalam konteks negara-negara demokratis, kebebasan pers tetap dijunjung tinggi, namun dengan batasan yang ditetapkan agar tidak mengganggu ketertiban umum atau menyebarkan ujaran kebencian. Kebijakan ini mendorong baik media maupun masyarakat untuk menjalankan kebebasan berbicara dengan penuh tanggung jawab.¹⁸

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menilai informasi yang akurat dan menghindari berita yang tidak benar. Program literasi digital dan media dirancang untuk memperkuat kemampuan individu dalam menganalisis sumber informasi dengan kritis. Di berbagai negara, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan platform media untuk mengembangkan kurikulum atau program literasi media, yang bertujuan membantu masyarakat memahami cara penyajian

<<https://doi.org/10.56021/9780801868504>>; D. A. Graber and J. Dunaway, 'Mass Media and American Politics (10th Ed.)', *SAGE/CQ Press*, 2017.

¹⁷ Mhd. Rasidin and others, 'The Role of Government in Preventing the Spread of Hoax Related the 2019 Elections in Social Media', *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3.2 (2020), 127-37 <<https://doi.org/10.17933/diakom.v3i2.76>>.

¹⁸ W. Littlejohn, Stephen, Karen A.Foss, and John G. Oetzel, *THEORIES OF HUMAN COMMUNICATION Eleventh Edition*, Waveland Press, Inc., 2017, LIII.

informasi politik serta membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi.¹⁹ Di era digital saat ini, kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial menjadi penting dalam upaya mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau propaganda politik yang dapat membingungkan masyarakat. Pemerintah secara rutin meminta platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk membatasi atau memberikan tanda pada konten yang dianggap melanggar kebijakan tertentu, terutama terkait isu-isu politik yang sensitif.²⁰

3. Peran Aktor Politisi Dalam Media Dan Politik

Politisi memainkan peran yang sangat penting dalam pemberitaan politik. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama informasi politik, tetapi juga secara aktif menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik sesuai dengan kepentingan mereka. Di era media sosial saat ini, banyak politisi yang memanfaatkan platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyampaikan pernyataan, atau bahkan melaksanakan kampanye.

Sebagai individu yang terlibat dalam arena politik, para politisi biasanya memiliki tim media yang bertugas untuk mengelola citra serta informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Salah satu fenomena yang umum terjadi adalah 'spinning,' yaitu usaha untuk memengaruhi cara pandang media dalam melaporkan suatu peristiwa dengan perspektif yang menguntungkan bagi politisi atau partai mereka. Selain itu, politisi juga memanfaatkan berbagai saluran seperti wawancara, konferensi pers, dan iklan untuk memperkuat posisi mereka di hadapan publik.²¹

a. Peran Aktor Politisi dalam Media

Politisi memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik melalui berbagai saluran komunikasi, terutama media massa dan media sosial.

¹⁹ Edward S. Herman; Noam Chomsky, 'Manufacturing Consent (Book)', 1984, 407.

²⁰ Robert W. McChesney, 'The Problem of the Media', *Episteme*, 2015, 275–90.

²¹ MANUEL CASTELLS, *Communication Power, Comunicação Mídia e Consumo*, 2010, VII <<https://doi.org/10.18568/cmc.v7i19.202>>.

Mereka sering memanfaatkan media untuk menyampaikan pesan politik, mengemukakan pandangan mereka mengenai isu-isu tertentu, serta merespons kritik atau tantangan yang muncul. Media sosial memberikan kesempatan bagi politisi untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, yang pada gilirannya membantu mereka membangun dukungan dan memperkuat pengaruh mereka. Banyak politisi memanfaatkan media sosial untuk memperkuat citra diri dan membangun merek pribadi. Dengan menampilkan aspek-aspek pribadi dan berbagi cerita hidup mereka, mereka dapat menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, media sosial memberikan kontrol lebih besar kepada politisi atas narasi yang ingin mereka sampaikan, tanpa harus bergantung pada media konvensional.²²

Di era digital ini, media memiliki peran yang sangat penting dalam kampanye politik. Politisi memanfaatkan media untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda. Kampanye yang dilakukan secara online dan offline saling terintegrasi dengan baik, memungkinkan politisi untuk menjangkau pemilih di berbagai platform. Politisi atau tim mereka sering menggunakan strategi "spin doctoring" untuk mengubah atau memodifikasi informasi agar lebih menguntungkan bagi citra atau posisi politik mereka. Ini mencakup pemilihan kata-kata atau fakta yang akan disajikan kepada publik dan media, dengan tujuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu atau kebijakan tertentu.²³

b. Peran Media dalam Memengaruhi Politik dan Demokrasi

Media sering dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi karena perannya dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta menyampaikan informasi yang penting kepada masyarakat. Media berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap tindakan para politisi,

²² Peter Lunt, 'Rethinking the Focus Group in Media and Communications Research', 46.2 (1996), 79-98.

²³ Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, 2018.

memastikan adanya transparansi, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, media juga berfungsi sebagai wadah untuk terjadinya wacana politik dan debat publik. Melalui proses diskusi dan dialog, media berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu politik dan sosial. Hal ini sangat krusial untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Lebih jauh lagi, media memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan isu-isu yang akan menjadi fokus perhatian masyarakat. Melalui konsep agenda-setting, media dapat memengaruhi topik yang dibahas di publik dan, pada gilirannya, memengaruhi perhatian serta tindakan para politisi terhadap isu-isu tertentu ²⁴.

c. Dampak Peran Aktor Politisi dalam Media Terhadap Masyarakat

Melalui penerapan strategi komunikasi yang tepat, para politisi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara pandang publik terhadap kebijakan atau isu tertentu. Seringkali, persepsi masyarakat mengenai isu-isu tersebut sangat ditentukan oleh cara penyampaian yang dilakukan oleh politisi di berbagai platform media. Hal ini dapat berujung pada terjadinya polarisasi atau terbentuknya konsensus, tergantung pada metode komunikasi yang digunakan. Media berperan penting dalam memperluas akses terhadap informasi politik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kampanye digital yang kreatif dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, seperti pemilihan umum.

Namun, di sisi lain, media sosial juga berpotensi menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat. Proses penyaringan informasi atau fenomena "*echo chamber*" dapat memperkuat pandangan dari satu kelompok tertentu dan

²⁴ Johanna Dunaway Doris A. Graber, 'The Media and American Politics', in *The Iowa Precinct Caucuses* (United Kingdom: CQ Press, 2018), pp. 3–10 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt20mvfpw.6>>.

mengasingkan kelompok lainnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan fragmentasi sosial.²⁵

4. Media Sosial Dan Demokratisasi Informasi

Media sosial telah mengubah secara drastis cara informasi disebarkan dan diakses. Dalam era digital saat ini, platform-platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh, membagikan, dan bahkan menciptakan informasi. Salah satu dampak penting dari perkembangan ini adalah demokratisasi informasi, yang berarti akses yang lebih luas dan terbuka terhadap informasi bagi publik. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi.

Salah satu elemen krusial yang muncul dalam era digital adalah keberadaan media sosial, yang kini telah menjadi komponen esensial dalam dinamika politik. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi dengan kecepatan dan jangkauan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Melalui media sosial, publik memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengungkapkan pendapat, baik dalam mendukung maupun menentang kebijakan pemerintah serta sikap para politisi.

Penggunaan media sosial oleh aktor politik dapat membawa sejumlah konsekuensi negatif. Salah satu contohnya adalah penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) yang dapat dengan cepat memperburuk keadaan dan memengaruhi stabilitas politik di suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan regulasi yang tegas mengenai etika dalam penyebaran informasi di media sosial, serta bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi media yang cukup.²⁶

Media sosial telah menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang sebelumnya sulit diperoleh. Berbagai berita dan pandangan kini

²⁵ Andrew Chadwick, *The Hybrid Media System* (London: Oxford University Press, 2020).

²⁶ Zeynep Tufekci, *Twitter and The Tear Gas*, 2017; Chadwick.

dapat diakses dengan mudah hanya melalui beberapa klik. Platform seperti Twitter dan Facebook memungkinkan pengguna untuk mengikuti perkembangan isu terkini dari berbagai sumber tanpa harus bergantung pada media massa konvensional. Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi produsen informasi. Siapa pun dapat membagikan informasi, pendapat, atau analisis mereka melalui media sosial tanpa memerlukan latar belakang jurnalistik atau akses ke media formal. Fenomena ini melahirkan jurnalistik warga, di mana masyarakat dapat melaporkan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka secara langsung.

Penggunaan media sosial juga telah meningkatkan transparansi, terutama dalam konteks politik dan pemerintahan. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau tindakan publik, mendiskusikan kebijakan, dan menyuarakan isu-isu sosial serta politik yang memerlukan perhatian. Pemerintah, organisasi, dan tokoh masyarakat sering kali diawasi dan dituntut untuk memberikan respons yang cepat terhadap isu-isu yang muncul di media sosial. Lebih jauh lagi, media sosial menyediakan beragam sumber informasi dari seluruh dunia, yang memperkaya perspektif masyarakat dalam memahami suatu isu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terpapar pada narasi media utama, tetapi juga pada berbagai sudut pandang dari individu atau kelompok yang berbeda.²⁷

Informasi yang beredar secara bebas di platform media sosial menimbulkan risiko terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat. Berita palsu atau hoaks dapat menyebar dengan cepat, memengaruhi pandangan masyarakat, serta menimbulkan kebingungan atau konflik. Algoritma yang digunakan oleh media sosial sering kali menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan fenomena gelembung informasi. Akibatnya, pengguna cenderung hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, yang pada gilirannya mempersempit wawasan. Beberapa

²⁷ Mariana C. Castells, *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume I (Information Age Series, Anaphylaxis and Hypersensitivity Reactions)* (New York: Wiley-Blackwell, 2010), I <<https://doi.org/10.1007/978-1-60327-951-2>>.

pihak dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda atau informasi yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik. Dalam ranah politik, misalnya, media sosial sering digunakan sebagai sarana kampanye yang tidak selalu menyajikan informasi secara objektif.²⁸

D. KESIMPULAN

Dalam konteks demokrasi terdapat hubungan yang sangat penting antara berita politik, pemerintah, dan aktor-aktor politik. Media berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah serta politisi dengan masyarakat luas. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur media, sehingga informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan negara. Sementara itu, para politisi memanfaatkan media sebagai alat untuk membentuk citra diri dan meningkatkan dukungan dari masyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh era digital, penting bagi pemerintah, media, dan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai literasi media guna menghindari dampak negatif seperti penyebaran disinformasi. Selain itu, kolaborasi antara aktor politik, pemerintah, dan media sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat serta mendukung proses demokrasi yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, W. Lance, 'The Politics of Illusion', in *The Pan-African Nation* (Chicago and London: University of Chicago Press, 2013), pp. 223–57 <<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226023564.003.0008>>
- Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, 2018
- CASTELLS, MANUEL, *Communication Power, Comunicação Mídia e Consumo*, 2010, VII <<https://doi.org/10.18568/cmc.v7i19.202>>
- Castells, Mariana C., *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume I (Information Age Series, Anaphylaxis and Hypersensitivity Reactions)* (New York: Wiley-Blackwell,

²⁸ Alfred Hermida, 'Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism', *Journalism Practice*, 4.3 (2010), 297–308 <<https://doi.org/10.1080/17512781003640703>>.

- 2010), I <<https://doi.org/10.1007/978-1-60327-951-2>>
- Chadwick, Andrew, *The Hybrid Media System* (London: Oxford University Press, 2020)
- Creswell, John W., *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- Doris A. Graber, Johanna Dunaway, ‘The Media and American Politics’; in *The Iowa Precinct Caucuses* (United Kingdom: CQ Press, 2018), pp. 3–10 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt20mvfpw.6>>
- Edward S. Herman; Noam Chomsky, ‘Manufacturing Consent (Book)’, 1984, 407
- Graber, D. A., and J. Dunaway, ‘Mass Media and American Politics (10th Ed.)’, *SAGE/CQ Press.*, 2017
- Gross, Peter, *Entangled Evolutions. Media and Democratization in Eastern Europe. Baltimore, MD and Washington, D.C.: The Johns Hopkins University Press/ Woodrow Wilson Center Press, 2002. ISBN 0-801868505. 226 Pgs.*, 2002 <<https://doi.org/10.56021/9780801868504>>
- Hermida, Alfred, ‘Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism’, *Journalism Practice*, 4.3 (2010), 297–308 <<https://doi.org/10.1080/17512781003640703>>
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), VII
- Lazarsfeld, Paul F, Bernard R Berelson, and William N Mcphee, *VOTING* (Chicago: The University of Chicago Press, 1954)
- LEAVY, PATRICIA, *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches, Sustainability (Switzerland)* (New York and London: The Guilford Press, 2017), XI
- Littlejohn, Stephen, W., Karen A.Foss, and John G. Oetzel, *THEORIES OF HUMAN COMMUNICATION Eleventh Edition*, *Waveland Press, Inc.*, 2017, LIII

- Lunt, Peter, 'Rethinking the Focus Group in Media and Communications Research', 46.2 (1996), 79–98
- Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), xi
- McChesney, Robert W., 'The Problem of the Media', *Episteme*, 2015, 275–90
- McComb, Maxwell E., and Donald L. Shaw, 'American Association for Public Opinion Research The Agenda-Setting Function of Mass Media Author (s): Maxwell E . McCombs and Donald L . Shaw Published by: Oxford University Press on Behalf of the American Association for Public Opinion Research Stabl', *Public Opinion Quaterly*, 36.2 (1972), 176–87
- McCombs, Maxwell E., and Donald L. Shaw, 'The Agenda-Setting Function of Mass Media1 2', *The Agenda Setting Journal*, 1.2 (2017), 105–16 <<https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>>
- McQuail, Denis, *McQuail's Mass Communication Theory*, 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), xi
- Newman, Nic, Richard Fletcher, Craig T. Robertson, Kirsten Eddy, and Rasmus Kleis Nielsen, 'Reuters Institute Digital News Report 2022', 53.9 (2022), 1689–99
- Project, Media Insight, 'The Personal News Cycle: How Americans Choose to Get News', *American Press Institute*, 2014
- Rasidin, Mhd., Doli Witro, Betria Zarpina Yanti, Rahma Fitria Purwaningsih, and Wiji Nurasih, 'The Role of Government in Preventing the Spread of Hoax Related the 2019 Elections in Social Media', *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3.2 (2020), 127–37 <<https://doi.org/10.17933/diakom.v3i2.76>>
- Shearer, Elisa, and Amy (Pew Research Center) Mitchell, 'News Use Across Social Media Platforms in 2020: Facebook Stands Out as a Regular Source of News for About a Third of Americans', *Pew Research Center*, 12 (2021), 1–18

Imaida Noor Hasibuan, Katimin, Hasrat Efendi Samosir : Peran Media Massa Dalam Konstruksi Citra Politisi Analisis Framing Pemberitaan Politik di Media Online Indonesia

Tufekci, Zeynep, *Twitter and The Tear Gas*, 2017